

PRAGMATISME SEMU DEMOKRASI DAN KENDALA ACUAN PENDIDIKAN KARAKTER; FENOMENA POLITIK TRANSAKSIONAL PEMILU LEGISLATIF 2014 DI LOMBOK TIMUR

Khirjan Nahdi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Hamzanwadi Selong, Lombok Timur

nahdi_nw@yahoo.co.id

Abstract

This article tries to map the political competence of legislative candidates and voters. It also attempts to formulate the simulation of the future democracy reality and formulate character education, which could be a comprehensive reference in political education. This becomes important matter for the democratic process, which is initiated from a comprehensive political education based on plausible values and reasons. Employing qualitative-phenomenological approach, the results of analysis show that the competence of incumbent legislators are low and they are unable to convince the voters. This condition is caused by the failure of political education and the weakness of political system. The emergence of transactional motive among the voters is an effect of the failure of political education. The writer argues that this condition should be elucidated through political education which builds character and guides the voters to vote for the politicians with good morality and ability.

Keywords: Political pragmatism, transactional politics, political education

Abstrak

Artikel ini berusaha memetakan kompetensi politik calon anggota legislatif dan calon pemilih, merumuskan simulasi realitas demokrasi masa depan dan memformulasi pendidikan karakter, yang bisa menjadi acuan komprehensif dalam pendidikan politik. Ini menjadi penting bagi proses demokrasi, yang diawali oleh pendidikan politik yang komprehensif, dengan basis nilai dan logika kritis yang jelas. Dengan pendekatan kualitatif-fenomenologis, hasil analisis menunjukkan kompetensi calon wakil rakyat masih rendah, sehingga tidak mampu meyakinkan calon pemilih. Kondisi ini disebabkan kegagalan pendidikan politik dan lemahnya sistem politik. Efek kegagalan pendidikan politik adalah munculnya motif transaksi para calon pemilih. Kondisi ini harus diintervensi melalui pendidikan politik yang membangun karakter, sehingga pemilih bisa memilih para politikus yang memiliki moralitas dan kemampuan.

Kata Kunci: Pragmatisme politik, politik transaksi, pendidikan politik

Pendahuluan

Setidaknya ada dua acuan penting yang menginspirasi kajian ini. *Pertama*, realitas proses pemilihan umum legislatif tanggal 9 April 2014 sebagai acuan induktif. Berdasarkan indikator proses penyelenggaraan, pemilihan umum legislatif ini relatif sukses dan tidak menimbulkan konflik horisontal secara fisik, walaupun pada beberapa tempat harus dilakukan pemilihan ulang dan pemilihan susulan karena beberapa alasan teknis. Kondisi tersebut harus diyakini berbanding terbalik jika diukur dengan indikator etika dan kedisiplinan demokrasi. Tidak teraturnya atribut dan instrumen sosialisasi calon anggota legislatif dipajang pada hampir semua fasilitas umum, yang sangat mengganggu kenyamanan ruang publik. Pajangan gambar partai politik di setiap sudut strategis fasilitas publik (terminal bus, pasar umum, taman kota, dan lainnya) dirasakan sangat mengganggu aktivitas dan mobilitas masyarakat. Tidak sampai di situ saja, gantungan baliho dalam ukuran tertentu, dengan cara ditempel di pohon-pohon pelindung pinggir jalan umum, selain mengganggu keasrian, juga akan menghambat pertumbuhan pohon-pohon tersebut karena ditembus paku berulang-ulang.

Kedua, konsep partisipasi politik sebagai acuan deduktif dalam realitas memunculkan berbagai bentuk partisipasi politik warga pemilih (Hilmy, 2012: 23). Realitas partisipasi politik yang menunjukkan kecenderungan pragmatisme semu demokrasi, di mana pilihan atas partai politik dan calon anggota legislatif hanya untuk maksud kekuasaan melalui kursi perwakilan rakyat. Pilihan atas partai politik dan calon anggota legislatif oleh para pemilih tidak didasarkan pada pemahaman *platform* dan ideologi partai. Para calon pemilih tidak memperoleh penjelasan tentang program pembangunan dan kecenderungan kepemimpinan dan manajerial para calon anggota legislatif dalam mengatur warga negara melalui kebijakan-kebijakan ketatanegaraan. Suasana sosialisasi calon anggota legislatif pada berbagai level lebih merupakan proses transaksi antara calon anggota legislatif dan calon pemilih.

Intinya, jika seorang calon anggota legislatif ingin dipilih pada proses pemilu, yang bersangkutan akan memberikan apa (uang dan atau barang), dan dalam jumlah berapa.

Realitas politik dan partisipasi politik seperti ini menjadi pemandangan umum yang terjadi hampir seluruh bagian negeri ini; di wilayah perkotaan hingga pedesaan, termasuk di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam teori, politik memang merupakan entitas pragmatis, tetapi pragmatisme yang edukatif dan produktif (Habermas, dalam Hardiman, 2008). Jika proses pragmatisme dilandasi oleh ketidakcerdasan dan “dibumbui” oleh proses transaksi, yang terjadi bukanlah pemberdayaan warga negara, melainkan tipu daya dalam politik (Budiardjo, 2008: 46; Surbakti, 1992: 27). Dalam skala luas dan jangka panjang, dengan mengakomodasi pola pikir reduksionis (Barnadib, 2000: 46-48), konsep partisipasi politik dalam realitas politik seperti ini merupakan kegagalan proses pendidikan politik oleh partai politik. Realitas ini pada akhirnya akan menjadi kendala pengembangan acuan pendidikan karakter dalam konteks pembangunan karakter bangsa. Acuan komprehensif pendidikan karakter (nilai, substansi, metode, proses, dan terintegrasi dalam kehidupan/tematik) (Zuchdi, dkk2013:7-9) tidak cukup, melainkan harus dilengkapi dengan kejelasan acuan basis dan logika kritis atas masing-masing pilihan nilai pendidikan karakter.

Memahami realitas politik melalui pemilihan umum legislatif sebagai realisasi partisipasi politik warga negara, dikaitkan dengan acuan komprehensif pendidikan karakter, diperlukan jawaban metodologis tentang: 1) bagaimana kecenderungan proses politik sebagai proses demokrasi di masa depan jika pendidikan politik yang mengintegrasikan substansi nilai karakter yang memiliki basis dan logika kritis tidak direncanakan dan dilaksanakan sejak saat ini?; 2) bagaimana rumusan akademis substansi pendidikan karakter yang dilengkapi dengan basis dan logika kritis? Dilengkapi dengan informasi dan data proses pemilihan legislatif melalui pen-

jajagan calon anggota legislatif oleh partai politik dan sosialisasi oleh masing-masing calon anggota legislatif kepada calon pemilih pada studi awal, secara khusus kajian ini bertujuan: 1) memetakan kompetensi politik calon anggota legislatif dan calon pemilih; 2) merumuskan simulasi realitas demokrasi masa depan jika kecerdasan calon pemilih tidak dibangun melalui proses pendidikan politik dengan menanamkan nilai karakter dengan substansi nilai yang memiliki kejelasan basis dan logika kritis; dan 3) menyusun formulasi akademis pendidikan karakter acuan komprehensif dalam pendidikan politik yang menawarkan nilai dengan basis dan logika kritis yang jelas.

Hasil kajian ini akan bermanfaat bagi proses demokrasi melalui proses politik yang diawali oleh pendidikan politik yang bercuan komprehensif dengan basis nilai dan logika kritis yang jelas, baik oleh partai politik maupun lembaga pendidikan lainnya yang memiliki kepedulian atas terbangunnya kecerdasan politik warga negara. Hasil kajian ini menjadi sangat penting bagi proses demokrasi melalui proses politik yang diawali oleh pendidikan politik yang bercuan komprehensif dengan basis nilai dan logika kritis yang jelas, baik oleh partai politik maupun lembaga pendidikan lainnya yang memiliki kepedulian atas terbangunnya kecerdasan politik warga negara.

Dengan demikian, proses politik di masa depan akan menjadi proses politik yang beretika dan menjunjung tinggi nilai-nilai kedisiplinan berpolitik, karena hasil kajian ini dapat dijadikan *role model* dalam rekayasa sosial bidang politik melalui pendidikan politik yang memiliki karakter yang komprehensif dengan kejelasan basis dan logika kritis bagi pemilih pemula, dan selanjutnya akan menjadi pemilih masa depan dalam proses politik di tanah air.

Dalam mendapatkan data, penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif-analitis dengan metode *realisticphenomenology* (Lester, 1997). Metode ini digunakan untuk memahami persoalan manusia dan masyarakat

melalui tindakan, motif tindakan, dan nilai yang dipahami melalui suatu tindakan, termasuk tindakan masyarakat dalam partisipasi politik dan pemilihan umum legislatif. Data dikumpulkan melalui proses sampling dan studi lapangan terhadap calon anggota legislatif pada proses penjajagan calon oleh partai politik dan proses sosialisasi calon anggota legislatif oleh calon anggota kepada calon pemilih. Melalui proses ini, data diperoleh dari 53 sampel (560 populasi calon anggota legislatif pada 5 Daerah Pemilihan di Kabupaten Lombok Timur), berkaitan dengan kompetensi masing-masing tentang *platform* partai politik yang diwakilinya, tugas dan fungsi legislatif, dan ketatanegaraan dalam konteks lokal. Studi lapangan dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi tentang substansi materi yang disampaikan calon kepada calon pemilih dan tanggapan calon pemilih pada 21 titik atau tempat sosialisasi calon anggota legislatif dari partai politik yang berbeda. Unit analisis dilakukan pada: 1) Kompetensi calon anggota legislatif tentang *platform* partai politik yang diwakilinya, tugas dan fungsi legislatif, dan ketatanegaraan dalam konteks lokal; 2) substansi materi sosialisasi yang disampaikan calon kepada calon pemilih dan tanggapan calon pemilih; 3) realitas partisipasi politik warga negara dalam pemilihan umum legislatif 2014; 4) simulasi realitas demokrasi melalui kecenderungan partisipasi politik warga negara dalam membangun demokrasi dengan mengacu realitas saat ini; 5) formulasi nilai karakter bangsa dengan kejelasan basis dan logika kritis dalam pendidikan politik.

Keseluruhan unit analisis merupakan atraksi induksi-deduksi melalui realitas proses politik pemilihan umum legislatif 2014 di Lombok Timur. Data pada masing-masing unit analisis dikumpulkan melalui instrumen panduan pengamatan dan panduan wawancara mendalam (Suparlan, 1994: 112). Data diperoleh melalui studi sampling pada Kantor DPC Partai dan studi lapangan pada kegiatan sosialisasi calon anggota legislatif. Analisis data pada masing-masing unit analisis dilakukan melalui induksi-deduksi dengan menggambarkan se-

cara kualitatif dan deskriptif realitas tindakan (calon anggota legislatif dan calon pemilih), yang dipengaruhi oleh kecerdasan dan motif tindakannya, gambaran simulatif tentang realitas demokrasi masa depan melalui proses politik dewasa ini, dan formulasi pendidikan politik yang menawarkan karakter dengan kejelasan basis dan logika kritis kepada calon pemilih.

Demokrasi dan Transisi Politik

Sejak runtuhnya rezim Orde Baru hingga memasuki tahun keenambelas Orde Reformasi saat ini masih merupakan masa transisi politik di Indonesia. Masa transisi ini ditandai dengan belum mantap dan mapannya proses politik melalui pemilihan umum; legislatif, presiden, maupun pemilihan kepala daerah (gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota). Masa seperti ini merupakan *conditiosinequanon* bagi bangsa yang mendambakan reformasi dengan agenda yang tercapai dengan baik. Hanya saja, proses transisi ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan dampak destruktif dan investasi yang sia-sia. Kondisi transisi dalam proses politik dan demokrasi saat ini tampak seperti proses transisi dalam proses perjalanan manusia. Setiap orang memiliki tujuan ideal, dan dalam perjalanan menuju tujuan ideal tersebut hampir dipastikan akan menemui masa-masa kritis. Untuk menjaga konsistensi perjalanan hidupnya, tahapan transisi harus diikuti dengan tindakan-tindakan yang bertahap dan berjenjang. Menggunakan analogi kehidupan manusia sebagaimana terminologi Arnold van Gennep (1960), minimal ada tiga elemen dalam setiap tindakan menjaga konsistensi di masa kritis atau transisi, termasuk transisi politik dan demokrasi, yakni tindakan dengan tujuan yang jelas (penyadaran, peningkatan kompetensi, peningkatan partisipasi, kualitas proses, atau kualitas hasil), keruntutan prosedur dan etika tindakan (peraturan dan hukuman), dan investasi (manusia, biaya, dan prasarana-sarana).

Salah satu yang penting yang harus disiapkan dalam mengelola infrastruktur politik pada masa transisi ini adalah membangun karakter politik warga negara sejak dini bagi mereka yang akan segera ikut berpartisipasi dalam proses politik dan demokrasi. Bangunan karakter politik yang dimaksud adalah kondisi kultural warga negara yang mengedepankan etika dan kedisiplinan politik yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara tanpa ada pamrih dan menuntut transaksi dalam partisipasinya. Bangunan karakter politik yang diharapkan adalah karakter komprehensif (Kirschenbaum, 1995), yang dimulai dari proses penanaman (*inculcation*), keteladanan (*modelling*), fasilitasi (*facilitation*), dan pengembangan keterampilan berkarakter dalam kehidupan (*skillbuilding*). Proses pembangunan karakter politik dengan model komprehensif tersebut harus diikuti dengan basis dan logika kritis yang jelas. Basis dan logika kritis yang dimaksud adalah acuan pranata sosial-kemasyarakatan yang melingkupi dan diyakini masyarakat, seperti agama, budaya, dan lainnya, serta berbagai alasan, mengapa setiap warga perlu melakukan itu berdasarkan acuan tersebut untuk *trend* saat ini dan masa depan. Tujuan dari tindakan ini adalah terbangunnya kesadaran etik dan kedisiplinan warga negara (pemilih pemula) bahwa politik yang baik akan melahirkan pragmatisme demokrasi yang sehat dan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menyiapkannya tanpa adanya transaksi politik dalam bentuk apa pun (Di Palma, 1990). Prosedur tindakan dalam pembentukan karakter politik dengan model komprehensif ini adalah instrumen dan indikator pedagogik yang dikembangkan dalam proses pendidikan politik warga negara. Selanjutnya, investasi yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia (peneliti, pendidik, dan pengembang dalam proses pendidikan politik, prasarana-sarana pendidikan; sekolah maupun masyarakat, serta biaya finansial untuk menghela seluruh aktivitas pendidikan dan pembelajaran).

Karakter Komprehensif dalam Pendidikan Politik

Model Komprehensif Pendidikan Karakter yang akan dikembangkan dalam pendidikan politik pada kajian ini mengakomodasi model yang dikembangkan dalam pendidikan karakter melalui satuan pendidikan (persekolahan): 1) Pendidikan Karakter melalui Pengembangan Keterampilan Hidup (Zuchdi, dkk., 2006), yang menghasilkan Potret Pendidikan Karakter di TK hingga SMA/SMK (Laporan Penelitian Hibah Pasca UNY, 2005-2006); 2) Pengembangan Model Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di SD, yang menghasilkan Model Pendidikan Karakter di SD (Laporan Penelitian Hibah Pasca UNY, 2009-2011).

Kedua penelitian tersebut sudah melahirkan peta dan model pendidikan karakter melalui satuan pendidikan/lembaga persekolahan. Melalui penelitian dan pengembangan model pendidikan karakter dalam pendidikan politik ini, substansi komprehensif; *inculcation*, *modelling*, *facilitation*, dan *skillbuilding* dilengkapi dengan basis dan logika kritis, sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

Istilah pendidikan karakter yang dimaksud dalam kajian ini merupakan sebutan lain untuk pendidikan nilai sebagaimana dikenal sebelumnya, dan secara dokumentatif dapat diacu melalui *Kebijakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa* (2010-2012) yang tertuang dalam *Desain Induk Pendidikan Karakter* (2010). Fungsi pendidikan karakter, sebagaimana tertuang dalam dokumen tersebut: 1) pengembangan potensi dasar (hati baik, pikiran baik, dan perilaku baik); 2) perbaikan perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik; 3) penyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Ketiga fungsi dimaksud dirasakan sangat penting dalam proses politik dan demokrasi dilandasi dengan keyakinan dan pikiran kritis masing-masing warga negara. Ruang lingkup implementasinya meliputi: keluarga, satuan

pendidikan/sekolah, masyarakat sipil dan masyarakat politik, dunia usaha, dan media massa.

Kata politik dipahami dalam dua terminologi: perebutan kekuasaan dan mengatasi konflik (Agnes, 2000: 12). Kedua pemahaman tersebut membutuhkan pragmatisme politik dalam arti luas, bahwa pragmatisme politik harus menjunjung tinggi kecerdasan masyarakat melalui terbentuknya kondisi keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan (Hilmy, 2012: 24). Namun demikian, dirasakan akan mustahil terbentuk kecerdasan dalam bentuk keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan melalui pragmatisme politik tanpa diawali dengan kesadaran kritis bahwa apa yang dilakukan bermakna bagi individu, masyarakat dan bangsa saat ini dan masa selanjutnya. Dengan karakter yang dilandasi kesadaran kritis sedemikian ini diyakini akan mampu memandu secara harmoni proses perebutan kekuasaan dengan maksud memperbaiki keadaan, dan dapat mengatasi konflik tanpa memunculkan konflik yang baru. Salah satu pilihan instrumen strategis untuk membangun kecerdasan dan kesadaran itu adalah pendidikan politik yang berkarakter melalui proses pendidikan politik secara komprehensif dengan kejelasan basis dan logika kritis. Studi awal yang memperkuat kerangka pikir penelitian ini studi kasus *Trend Partisipasi Pemilih* pada Pemilihan Kepala Daerah Propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur tahun 2013, Kajian kasus yang diinisiasi oleh Tuan Guru Bajang (TGB) Centre Kelompok Kerja Lombok Timur, 2013. Kajian ini fokus pada tipologi pemilih dan kecenderungan pemilih dalam memilih calon kepala daerah. Melalui kajian ini diperoleh simpulan tipologi pemilih menjadi: pemilih ideologis, pemilih kultural, dan pemilih transaksional. Kecenderungan pemilih atas calon kepala daerah ditentukan oleh tipologinya.

Kompetensi Calon Anggota Legislatif

Data ini merupakan gambaran secara sampling kompetensi calon anggota legislatif tentang tiga hal pokok (studi lapangan pada calon yang baru bergabung pada partai) yaitu,

pertama, Platform Partai (gambaran umum partai; azas dan tujuan partai; dan visi-misi partai); *kedua*, tugas dan fungsi legislatif; dan *ketiga*, ketatanegaraan dalam konteks lokal (visi dan misi Kabupaten Lombok Timur 2008-2013, dan prioritas pembangunan kabupaten 2008-2013). Dari 53 informan penelitian yang diwawancara diperoleh data yang digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Kompetensi Calon Anggota Legislatif

Jumlah Calon (%)	Kompetensi pada hal pokok	Kategori
2/53 (3,77%)	Platform Partai	Baik
13/53 (24, 52%)		Cukup
38/53 (71,69%)		Tidak Baik
11/53 (20,75%)	tugas dan fungsi legislatif	Baik
23/53 (43,39%)		Cukup
19/53 (35,84%)		Tidak Baik
3/53 (5,66%)	ketatanegaraan dalam konteks lokal (visi dan misi Kabupaten Lombok Timur 2008-2013, dan prioritas pembangunan kabupaten 2008-2013	Baik
8/53 (15,09%)		Cukup
42/53 (79,24%)		Tidak Baik

Materi Sosialisasi dan Respon Calon Pemilih

Materi sosialisasi terkait dengan: program partai yang diwakili jika terpilih dan pilihlah saya sebagai wakil Anda melalui partai. Dari 21 lokasi/titik sosialisasi oleh calon yang berbeda, diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 2
Materi Sosialisasi

Jumlah titik/lokasi (%)	Materi Sosialisasi
6/21 (28,57%)	program partai yang diwakili jika terpilih
15/21 (71,42%)	pilihlah saya sebagai wakil Anda melalui partai

Dalam proses komunikasi, materi sosialisasi pada data di atas direspon oleh peserta sosialisasi dengan variasi: akan diberi apa dan berapa baru memilih, apa jaminan jika Anda kami pilih, dan kami yakin bahwa Anda akan membawa aspirasi kami jika terpilih, sebagai berikut:

Tabel 3
Respon Calon Pemilih

Jumlah Titik/Lokasi	Tanggapan/Respon
13/21(61,90%)	akan diberi apa dan berapa baru memilih
4/21 (19,04%)	apa jaminan jika Anda kami pilih
4/21 (19,04%)	kami yakin bahwa Anda akan membawa aspirasi kami jika terpilih

Partisipasi Politik Warga Negara

Data partisipasi politik dalam pemilu dalam penelitian ini memiliki hubungan dengan respon calon pemilih pada saat mengikuti sosialisasi. Data ini diperoleh dari 60 orang yang dikonfirmasi alasan memilih partai/calon pada 10 TPS pada 3 desa yang berbeda. Terdapat 3 alasan seseorang memilih/partisipasi politik pada calon/partai tertentu: diberi uang/-sesuatu, dijanji akan diberi uang/sesuatu, dan yakin akan membawa aspirasi, sebagai berikut:

Tabel 4
Alasan Memilih

Jumlah Pemilih (%)	Alasan memilih partai/calon (partisipasi politik)*
35/60 (58,33%)	diberi uang/sesuatu
16/60 (26,66%)	dijanji akan diberi uang/sesuatu
9/60 (15%)	yakin akan membawa aspirasi

Data pada tabel 1 dan 2 menunjukkan bahwa tidak memadainya kompetensi para calon anggota legislatif tentang partai yang akan diwakilinya, tugas dan fungsi legislatif, dan kondisi lokal daerahnya. Kualitas kompetensi yang rendah ini berakibat pada rendahnya kualitas materi sosialisasi seorang calon. Dari realitas ini tampak bahwa motif tindakannya memilih partai dan mewakili partai dan berharap jadi wakil rakyat dicurigai, semata-mata untuk memperoleh kekuasaan melalui representasi wakil rakyat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana seseorang akan melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik jika yang bersangkutan tidak begitu kompeten terhadap tugas dan tanggung jawabnya itu?

Data pada tabel 3 dan 4 merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari kondisi pada tabel 1 dan 2. Respon calon pemilih dan alasan memilih menunjukkan bukti bahwa kualitas antara calon yang dipilih dan dipilih sama-sama pada kondisi mengkhawatirkan. Para calon yang penting dipilih tanpa bersusah payah memahami motif ideal atas pilihan dan tindakannya. Demikian halnya dengan calon pemilih, bahwa pilihan atas siapa saja tidak penting asalkan dapat memenuhi permintaan menjelang pemilihan dan sesaat setelah pemilihan berlangsung.

Simulasi Realitas Demokrasi Masa Depan Berdasarkan Kondisi Saat Ini

Simulasi yang dimaksud pada bagian ini adalah kerangka pikir reduksionis dengan menghubungkan kondisi saat ini dengan kemungkinan yang akan terjadi pada proses demokrasi 20-30 tahun mendatang, jika tidak dilakukan tindakan-tindakan afirmatif terhadap calon anggota legislatif dan calon pemilih menyangkut tindakan, motif di balik tindakan, dan nilai yang dipahami atas tindakan politik yang demikian (Tilaar, 2012). Beberapa kemungkinan yang terjadi adalah: 1) proses politik dalam membangun demokrasi adalah ajang transaksi antara calon anggota legislatif dan calon pemilih; 2) aktor politik adalah mereka yang memiliki kapital (*money*) yang cukup untuk bertransaksi, walaupun tidak memiliki kompetensi tentang berbagai hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya; 3) Realitas dan kinerja wakil rakyat hanyalah sebatas rutinitas yang tidak memiliki *sense of developed* karena di dalamnya berada sebagian besar personal yang hadir dengan motif kekuasaan dan tidak memiliki acuan nilai kebijakan atas motif dan tindakannya memilih menjadi calon dan anggota legislatif; 4) calon pemilih adalah masyarakat wajib pilih yang tidak memiliki ideologi acuan dalam menentukan pilihan atas calon dan partai politik yang dipilihnya. Motifnya hanya satu yakni memperoleh sesuatu dari seorang calon sehingga ia bersedia memilihnya.

Jika keempat simulasi ini benar-benar terjadi, inilah yang dinamakan pragmatisme semu demokrasi dalam proses politik. Pragmatisme dalam politik memang dibutuhkan dan harus dikembangkan untuk maksud mempercepat terlaksananya kebijakan sehingga memenuhi indikator efektif. Tetapi jika pragmatisme itu dilakukan dengan motif, tindakan, dan nilai yang tidak memenuhi basis kebajikan melalui transaksi-transaksi, sesungguhnya telah terjadi pelanggaran atas etika dan kedisiplinan demokrasi.

Formulasi Nilai Karakter dengan Kejelasan Basis dan Logika Kritis

Formulasi nilai karakter yang dimaksud pada unit analisis ini adalah acuan komprehensif pengembangan karakter melalui pendidikan (nilai, substansi, metode, proses, dan tematik) tidaklah cukup, melainkan harus dilengkapi dengan basis sebagai sumber nilai dan logika kritis atas masing-masing. Basis nilai yang dimaksud adalah apa dasar yang diyakini sebagai acuan nilai karakter dikembangkan; agama yang diyakini dan budaya yang melingkupi kehidupannya? Pikiran ini muncul mengingat proses pengembangan karakter melalui acuan teoritik komprehensif di atas bukanlah suatu entitas tiba-tiba ada, melainkan entitas yang tidak lepas dari persoalan spiritualitas dan kultural objek pendidikan, termasuk dalam proses pendidikan politik. Sedangkan logika kritis yang dimaksud adalah mengapa seseorang harus mengembangkan suatu karakter tertentu? Sejak awal seseorang harus dilatih untuk memahami kausalitas atas pilihan-pilihannya terhadap sesuatu, termasuk mengembangkan suatu karakter tertentu dalam proses pendidikan, juga akan tindakan pendidikan politik.

Penutup

Realitas pragmatisme semu demokrasi dalam proses politik, yang melahirkan transaksi politik sehingga melahirkan simulasi kondisi demokrasi masa depan, dan alternatif pengembangan acuan teoritik komprehensif pengembangan

karakter melalui pendidikan dapat dipahami dalam hubungan sebagai berikut.

1. Rendahnya kompetensi calon wakil rakyat sehingga tidak mampu meyakinkan calon pemilih dan inilah salah satu bentuk kegagalan pendidikan politik dan lemahnya sistem politik. Realitas ini akan dapat dieliminir melalui proses seleksi (*fit and proper test*) terhadap calon wakil rakyat oleh partai politik.
2. Salah satu efek buruk dari kegagalan pendidikan politik adalah munculnya motif transaksi dari para calon pemilih atas pilihannya (calon/partai). Realitas ini diyakini akan berkurang bila dilakukan proses afirmasi dalam bentuk pendidikan politik terhadap warga negara melalui instrumen dan lembaga yang ada.
3. Jika kondisi ini tidak diintervensi melalui pendidikan politik yang membangun karakter dengan acuan teoritik komprehensif yang berbasis nilai tertentu dan logika kritik yang jelas, proses politik selanjutnya (masa depan) akan selalu memunculkan pragmatisme semu demokrasi, dan selalu terjadi pelanggaran atas etika dan kedisiplinan demokrasi. Karena itu diperlukan formulasi sebagai pelengkap pengembangan karakter melalui pendidikan dengan acuan teoritik komprehensif yang memiliki basis dan logika kritis yang jelas.

Daftar Rujukan

- Barnadib, Imam. 2000. *Pendidikan, demokrasi, otonomi, civil society, dan globalisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Di Palma, Giuseppe. 1990. *To Craft Democracies: an essay on Democratic Transitions*. Berkeley. University of California Press.
- Hardiman, Budi F. 2008. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hilmy, Masdar. 2012. *Islam Profetik: Substansi Nilai-Nilai Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Impulse-Kanisius.

- Kemdikbud RI. 2010. *Desain Induk Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemdikbud.
- Kirschenbaum, H. 1995. *100 Ways To Enhance Values and Morality in Schools and Youth Settings*. Boston: Allyn and Bacon.
- Ku, Agnes. S. 2000. *Revisiting the Nation of 'Public' in Habermas Theory-Toward a Theory of Policies Credibility*, dalam *Sociological Theory* Vol. 18, 2 July. Washington DC: American Sociological Association.
- Lester, Embree. 1997. *Encyclopedia of Phenomenology*. New York: Centre for Advanced Research in Phenomenology.
- Nahdi, Khirjan. 2013. *Trend Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Propinsi NTB dan Kabupaten Lombok Timur*. (Laporan Penelitian). Selong. TGB Centre.
- Suparlan, Parsudi. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Program S2 Kajian Wilayah Amerika UI.
- _____. 1997. "Paradigma Naturalistik dalam Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Penggunaannya" dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, No, 53, Vol. 21. Jakarta. Jurusan Antropologi FISIP UI.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia.
- Tilaar, H.A.R. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- van Gennep, Arnold. 1960. *Rites of Passage*. Chicago. University Press.
- Zuchdi, Darmiyati, dkk. 2006. *Pendidikan Karakter melalui Pengembangan Keterampilan Hidup* (Laporan Penelitian Hibah Pasca UNY).
- _____. 2011. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter dengan Pendekatan Komprehensif Terintegrasi dalam Pembelajaran Bidang Studi di SD* (Laporan Penelitian Hibah Pasca UNY).
- _____. 2013. *Model Pendidikan Karakter: Terintegrasi dalam Pembelajaran dan Pengembangan Kultur Sekolah*. Yogyakarta. MP.